BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.1 Pelaksanaan KKL-PPM Di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Pada pelaksanaan KKL-PPM di Desa Cibeureum sebelumnya mahasiswa telah dibekali tentang mekanisme apa saja yang harus dilaksanakan pada kegiatan KKL-PPM . Pada konsolidasi yang diadakan oleh para pembimbing sebelum mahasiswa turun ke lapangan yaitu dengan pemberian materi dengan tujuan agar mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada saat KKL-PPM serta dapat mengimplemtasikan kepada masyarakat mengenai program-program yang sudah dibuat sebelumnya oleh peserta KKL-PPM Unikom 2013.

Maksud dari kegiatan KKL-PPM Unikom ini adalah memberi gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana caranya mahasiswa bermasyarakat khususnya dilokasi masing-masing yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana KKL-PPM Unikom sehingga mahasiswa lebih siap dan dapat mempersiapkan diri. Kegiatan pembekalan KKL-PPM Unikom meliputi pemberian materi-materi mengenai tata cara pelaksanaan KKL-PPM Unikom sampai dengan penyususnan laporan KKL-PPM Unikom.

Penyerahan mahasiswa KKL-PPM Unikom ke desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2013 ini yang berlokasi di Madrasah Aliyah Nurul Huda yang diserahkan langsung oleh Koordinator KKL-PPM Unikom kepada Kepala Desa Cibereum berjumlah 20 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Adapun rancangan kegiatan KKL-PPM Unikom yang dilaksanakan pada minggu pertama meliputi beberapa kegiatan seperti persiapan, pendekatan, inventarisasi dalam melaksanakan kegiatan diberbagi bidang diantaranya pendidikan, pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan

hukum, serta penyusunan kegiatan program kerja. Penyusunan Program minggu pertama berdasar pada tahap hasil observasi awal dan wawancara serata mengikuti semua kegiatan yang diadakan masyarakat desa Cibereum dan melakukan ekspose kepada kepala Dusun serta kepala RW di Desa Cibeureum. Kegiatan program yang telah disusun pada minggu pertama mulai dilaksanakan secara rutin pada minggu ke dua dan berdasarkan buku panduan dan program-program yang telah dibuat mulai diimplementasikan dilingkungan masyarakat dari segi bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial ekonomi.

A. Bidang Pendidikan

Didalam bidang pendidikan penulis sebagai mahasiswa KKL memberikan pengajaran dasar-dasar komputer, karena dari info yang penulis dapat dari para siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari dan SMP Muhammadiah 3 pemberian materi komputer sangat minim sekali, jadi penulis selaku mahasiswa KKL-PPM memberikan materi Pengenalan MS Office dan Software simulasi cara merakit Komputer.tetapi masih banyak kendala yang ditemukan pada saat memberikan pengajaran terhadap pengenalan MS office dan software simulasi ini. Karena mininya perangkat komputer di sekolah-sekolah yang ada di desa cibeureum, jadi ketika penulis memberikan pengajaran kepada siswa-siswi ketika ingin mempraktekan apa yang diberikan pengajaran oleh mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 mereka pun harus silih berganti untuk kedepan dengan memakai perangkat komputer yang disediakan oleh mahasiswa KKL-PPM. minimnya perangkat komputer ini menjadi suatu kendala bagi siswa-siswi untuk belajar lebih dalam lagi mengenai materi yang kami berikan. Namun pada pengajaran mengenai MS Office dan Software simulasi cara merakit komputer siswa-siswi sangat antusias untuk lebih mendalaminya terbukti ketika penulis mencoba memberikan kesempatan kepada siswa-

siswi tersebut mereka mampu menjalakan dari MS office tersebut. Selain itu juga mahasiswa KKL-PPM memberikan pengenalan dan pengajaran ini pada aparatur Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan siswa dan Aparatur desa yang sebelumnnya tidak mengetahui menjadi tahu dan paham dan dapat menggunakan komputer dan memanfaatkan teknologi ICT dengan baik. Adapun rentang waktu pelaksanaan program kerja pada bidang pendidikan ini dilakukan secara rutin setiap hari dari minggu pertama sampai minggu terakhir.

B. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan mahasiwa KKL-PPM membuat kegiatan penyuluhan gebyar posyandu, penulis dan rekan mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 melakuakan terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat desa seperti imunisasi, KB, posyandu, dan yang bersangkutan dengan masalah kesehatan lainnya, salah satunya bertemu dengan para kader posyandu. Yang pada akhirnya membuat mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 tertarik untuk mengadakan kegiatan penyuluhan gebyar posyandu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Maksud dari diadakannya kegitan ini adalah untuk Dimana hasil yang dicapai adalah para ibu hamil, ibu menyusui semakin paham akan program-program Posyandu. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan gebyar posyandu dilakukan pada minggu ketiga tepatnya tanggal 25 Juli 2013, yang dimulai dari jam 09.00 s/d selesai yang bertempat digedung Kecamata Kertasari.

C. Biadang Sosial Ekonomi

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa KKL-PPM unikom yaitu dengan membuat plang batas desa dan plang nama gang pada setiap RW. Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosial ini yaitu masyarakat menjadi tau nama-nama daerah yang ada di Desa Cibeureum berkat adanya plang tersebut maka orang-orang pendatang tidak bingung ketika mencari suatu alamat atau daerah di Desa Cibereum tersebut dan adapula kegiatan sosial yang mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 lakukan adalah dengan Pemberian bantuan beberapa perangkat komputer kepada aparatur Desa Cibereum dan Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari,.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Imunisasi

Dalam menganalisis pelaksanaan program gebyar posyandu ini akan dilakukan melalui teori Implementasi Kebijakan menurut Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

> "*policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects".* (Edward III, 1980:1).

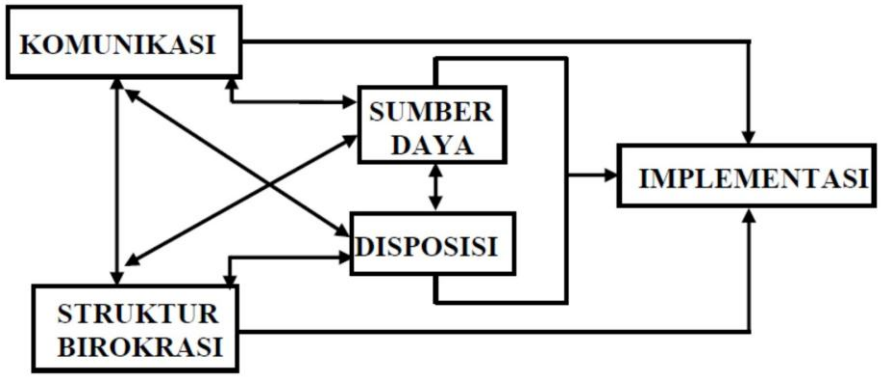
Jadi Implementasi Kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dari pengertian Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edwards III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. *Comunication* (komunikasi).
2. *Resources* (sumber daya).
3. *Disposition* (disposisi/sikap).
4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi).

(Edwards III, 1980:10-11).

Gambar 4.1
Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III



Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh factor-faktor diatas, adapun

Pertama, *communication* (komunikasi) menurut George C. Edwards III yaitu:

> *"The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be followed. Naturally, these communications need to be accurate and they must be accurately perceived by implementers. Many obstacles*

> *lie in the path of transmission of implementation communication".* (Edwards III, 1980:17).

Komunikasi sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalalm suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalan akan kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Para pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dilanjutkan oleh para pelaksana dengan tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam komunikasi Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* bahwa komunikasi terdiri dari *transmision* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). (Edwards III, 1980:10).

Kedua, *Resources* (sumber daya) menurut George C. Edwards III yaitu:

> *"No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of the others involved in implementation; the outhority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will mean that laws will not be enforced, services will not provided, and reasonable regulation in policy implementation"*. (Edwards III, 1980:53).

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III

sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Ketiga, *Dispotition* (disposisi) menurut George C. Edwards III, yaitu:

> *"The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reasons is the complexity of the policies them selves. The way in which implementers exercise their direction, however, defend in large part upon their dispositions toward the policies, their attitudes, in turn, will be influenced by their view toward the policies per see and by how they see the policies effecting their organizational and personal interest*". (Edwards III, 1980:89).

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana

berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

Keempat, *Bureacratic Structure* (Struktur Birokrasi) menurut George C. Edwards III, yaitu:

> *"Policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve, two prominent characteristics of bureaucracies are standarf operating procedurs (SOPs) and fragmentation the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia"*. (Edwards III, 1980:125).

Bureaucratic structure merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, didalam sturktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard operating procedurs*) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah *fragmentasi* yang berasal dari luar organisasi.

Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* terdapat dua hal yang terdapat dalam struktur

birokrasi yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP), dan *Fragmentation*(Fragmentasi). (Edwards III, 1980:11-12).

Berdasarkan Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) merupakan sumber-sumber dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah mencukupi dan para pelaksananya mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mempunyai keinginan untuk melakukannya akan tetapi implementasi kebijakan masih belum dapat dikatakan efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi yaitu*Standard Operating procedure* (SOP) dan *Fragmentation* (penyebaran tanggung jawab). *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan *fragmentation* (fragmentasi) adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan *fragmentation* (fragmentasi) adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan-tindakan yang nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijaksanaan yang dilakukan individu atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga menciptakan suatu hasil dari kinerja implementasi kebijakan yang baik dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut maka berikut ini analisa pelaksanaan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi.

4.2.1 Komunikasi Pelaksanaan Kegiatan Program Imunisasi di Desa Cibeureum

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam komunikasi yaitu : penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Edwards III, 1980:10. Komunikasi kegiatan penyuluhan program gebyar posyandu program imunisasi di Desa Cibeureum Kecamatan kertasari Kabupaten Bandung terjalin begitu baik ini terbukti dari pihak penulis dan rekan mahasiswa KKL-PPM Unikom pada saat mengajukan kerjasama kepada pihak sponsor langgsung ditanggapi dengan baik dan menyanggupi untuk ikut berpartisipasi pada acara penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Begitupun komunikasi dengan kader Posyandu dan para ibu hamil dan menyusui serta ibu yang memiliki balita pada saat pemberitahuan akan diadakannya program ini mereka merspon dengan baik pula dan menyatakan siap berpartisipasi. Komunikasipun terjalin dengan baik antara narasumber dan peserta pada saat pelaksanaan penyuluhan pogram,karena narasumber yang diwakili dari pihak sponsor (SUN) penyampaian informasi nya jelas dan konsisten membahas mengenai pentingnya pergi ke posyandu dan memberikan materi tentang 5 vaksin dasar imunisasi bayi, adapun isi materi yang disampaikan mengenai 5 vaksin dasar imunisasi adalah :

5 Vaksin Imunisasi Dasar Bayi.

a) Vaksin Polio; Bibit penyakit yang menyebabkan polio adalah virus, vaksin yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah vaksin hidup (yang telah diselamatkan) vaksin berbentuk cairan. pemberian pada anak dengan meneteskan pada mulut. Kemasan sebanyak 1 cc / 2 cc dalam 1 ampul.

b) Vaksin Campak; Bibit penyakit yang menyebabkan campak adalah virus. Vaksin yang digunakan adalah vaksin hidup. Kemasan dalam flacon berbentuk gumpalan yang beku dan kering untuk dilarutkan dalam 5 cc pelarut. Sebelum menyuntikkan vaksin ini, harus terlebih dahulu dilarutkan dengan pelarut vaksin (*aqua bidest*). Disebut beku kering oleh karena pabrik pembuatan vaksin ini pertama kali membekukan vaksin tersebut kemudian mengeringkannya. Vaksin yang telah dilarutkan potensinya cepat menurun dan hanya bertahan selama 8 jam.

c) Vaksin BCG; Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang berasal dari bakteri. Bentuknya vaksin beku kering seperti vaksin campak berbentuk bubuk yang berfungsi melindungi anak terhadap penyakit *tuberculosis* (TBC). Dibuat dari bibit penyakit hidup yang telah dilemahkan, ditemukan oleh Calmett Guerint. Sebelum menyuntikkan BCG, vaksin harus lebih dulu dilarutkan dengan 4 cc cairan pelarut (NaCl 0,9%). Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan dalam waktu 3 jam. Vaksin akan mudah rusak bila kena sinar matahari langsung. Tempat penyuntikan adalah sepertinya bagian lengan kanan atas.

d) Vaksin Hepatitis B; Bibit penyakit yang menyebabkan hepatitis B adalah virus. Vaksin hepatitis B dibuat dari bagian virus yaitu lapisan paling luar (mantel virus) yang telah mengalami proses pemurnian. Vaksin hepatitis B akan rusak karena pembekuan dan pemanasan. Vaksin hepatitis B paling baik disimpan pada temperatur 2,8°C. Biasanya tempat penyuntikan di paha 1/3 bagian atas luar.

e) Vaksin DPT; Terdiri *toxoid difteri*, bakteri pertusis dan *tetanus toxoid*, kadang disebut “triple vaksin”. Berisi vasin DPT, TT dan DT. Vaksin DPT disimpan pada suhu 2,8°C kemasan yang digunakan : Dalam -

5 cc untuk DPT, 5 cc untuk TT, 5 cc untuk DT. Pemberian imunisasi DPT, DT, TT dosisnya adalah 0,5 cc. Dalam pemberiannya biasanya berupa suntikan pada lengan atau paha.

Ditambah dengan bahasa penyampaian yang ringan membuat peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi ini mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh narasumber.

4.2.2 Sumber Daya Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Posyandu Program Imunisasi di Desa Cibereum

Sumber daya pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasai Kabupaten Bandung terdiri dari

a) Kader posyandu Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berjumlah 29 orang dimana satu orang kader mewakili satu RW.
b) Sponsor (SUN) berjumlah 8 orang terdiri dari 2 orang bidan (narasumber), 1 orang MC acara, 4 orang SPG dan 1 orang supir.
c) Mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 berjumlah 20 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 3 orang perempuan.

Kader di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung jenjang pendidikan rata-rata SMA dan ada juga yang memiliki jenjang pendidikan S1 karena seseorang di Desa Cibeureum yang ditunjuk menjadi kader harus memiliki kriteria sebagai berikut : Dapat membaca dan menulis, Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan, Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat, Mempunyai waktu yang cukup, Bertempat tinggal di wilayah Posyandu, Berpenampilan ramah dan simpatik, Diterima masyarakat setempat. Untuk pengetahuan mengenai Posyandu pun para kader di setiap RW sudah memahami dan mengerti apa saja tujuan dan

pelaksanaan program-program Posyandu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Selain para kader Posyandu pelaksanaan penyuluhan gebyar Posyandu ini didukung oleh pihak sponsor dimana sponsor yang ikut berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi ini adalah tim SUN unit layanan gizi ibu hamil dan balita dimana tim SUN unit layanan gizi dan ibu hamil terdiri dari 2 bidan (Narasumber), 1 orang MC acara, 4 tim SPG dan 1 supir. Tim SUN inilah yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan penyuluhan gebyar Posyandu program imunisasi dimana tim SUN ini yang menjadi Narasumber pada acara penyuluhan ini. Adapun materi yang diberikan mengenai vaksin dasar imunisasi, dimana dari pihak SUN unit layanan gizi dan ibu hamil dan balita begitu menguasai materi yang diberikan dan metode pembicaraan yang dilakukan bersifat nonformal dimana narasumber memberikan penyuluhan ini bukan dengan cara menggurui melainkan dengan sharing pengetahuan dan diselingi dengan oborlan ringan seperti candaan dan plesetan nama makanan, sehingga peserta tidak merasakan bosan dalam menerima materi yang diberikan narasumber. Mahasiswa KKL-PPM Unikom 2013 ikut menjadi pelaksana kegiatan penyuluhan gebyar Posyandu namun kapasitasnya sebagai panitia acara tersebut.

4.2.3 Disposisi/Sikap Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Posyandu Program Imunisasi di Desa Cibereum

Sikap dari para kader Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan Gebyar Posyandu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupten Bandung menjadi kunci keberhasilan kegitan ini karena kader posyandu begitu aktif untuk mempersiapkan semuanya mulai dari memberi tahu ibu hamil dan menyusui serta ibu yang memiliki balita untuk hadir dalam kegiatan gebyar posyandu program imunisasi. Selain itu sikap dari pihak sponsor (SUN) selaku narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan

penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi pun begitu terbuka, ramah dan murah senyum, ini terbukti setiap peserta yang mengajukan pertanyaan dijawab narasumber dengan sikap yang ramah dan tidak lepas dari senyum dan diselingi dengan canda tawa, ini yang menjdi acara ini semakin interaktif antara narasumber dan para peserta. Didalam pelaksanaan kegiatan gebyar posyandu program imunisasi ini sikap mahasiswa KKL-PPM Unikom 2013. Dimana mahasiswa perlu keseriusan dalam melaksanakan gebyar posyandu program imunisasi ini dengan mempersiapkan segala kebutuhan maupun materi yang akan diberikan kepada masyarakat khususnya ibu yang memiliki balita. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan gebyar posyandu dalam program imunisasi ini tergantung pada sikap dari pelaksana yaitu baik dari kader posyandu, peserta maupun mahasiswa KKL-PPM yang dibutuhkan disini adalah keseriusan dan persamaan tujuan dari pihak-pihak yang terkait agar kegiatan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi ini berjalan dengan efektif.

4.2.4 Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Posyandu Program Imunisasi di Desa Cibereum

Standard Operating procedure (SOP) posyandu di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung sudah dapat terbilang baik, karena para kader yang menjadi penggerak ditiap RW nya begitu memahami fungsi dan tujuan posyandu. Posyandu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang menentukan tanggal dan hari nya adalah kader, tim penggerak PKK Desa serta petugas kesehatan dari puskesmas. Sistem pelayanan masyarakat dengan menggunakan system 5 meja yaitu :

1) Meja I : Pendaftaran.
2) Meja II : Penimbangan Bayi/Balita.
3) Meja III : Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat).
4) Meja IV : Penyuluhan Perorangan Berdasarkan KMS.

5) Meja V : Pelayanan KB dan Kesehatan :
    a) Imunisasi.
    b) Pemberian vitamin A Dosis Tinggi berupa obat tetes ke mulut tiap bulan Februari dan Agustus.
    c) Pembagian pil atau kondom.
    d) Pengobatan ringan.
    e) Kosultasi KB-Kesehatan.

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader sedangkan meja V merupakan meja pelayanan paramedis.

Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi :

1) Kesehatan ibu dan anak :
    a) Pemberian pil tambah darah (ibu hamil).
    b) Pemberian vitamin A dosis tinggi (bulan vitamin A pada bulan Februarii dan Agustus).
    c) PMT.
    d) Imunisasi.
    e) Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita melalui pertambahan berat badan setiap bulan. Keberhasilan program terlihat melalui grafik pada kartu KMS setiap bulan.
2) Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom.
3) Pemberian Oralit dan pengobatan.

Adapun saat pelaksanaan kegiatan gebyar posyandu program imunisasi di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pembagian tugas antara sponsor, kader dan peneliti beserta rekan mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 adalah :

a) Pihak sponsor (SUN) bertindak sebagai narasumber / pemberi materi penyuluhan dan menyediakan bingkisan bagi ibu-ibu dan balita yang hadir pada acara kegiatan penyuluhan program gebyar

posyandu di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

b) Kader posyandu Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung bertugas mendata ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui serta yang memiliki balita untuk di undang di kegiatan penyuluhan gebyar posyandu program imunisasi ini.

c) Peneliti dan rekan mahasiswa KKL-PPM UNIKOM 2013 bertugas mengurus perizinan untuk kegiatan penyuluhan gebyar posyandu ini, adapun surat tembusan yang diberikan kepada Kepala Camat Kertasari, Kepala Desa Cibeureum, Kepala BPD Desa Cibeureum dan Kapolsek Pacet.

Adapun hasil yang didapat setelah diadakanya penyuluhan imunisasi tersebut bagi masyarakat khususnya ibu yang memiliki bayi dan balita :

a) Ibu-ibu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang memiliki balita memperoleh peningkatan penetahuan akan pentingnya program imunisasi untuk menjaga kekebalan tubuh anaknya.

b) Ibu-ibu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang memiliki balita mengetahui jenis-jenis vaksin dasar imunisasi, jadi mereka mengetahui vaksin dasar bagi anaknya.

c) Ibu-ibu di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang memiliki balita semakin rajin dating ke posyandu untuk mengikuti kegiatan imunisasi untuk anaknya.

d) Ibu-ibu di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung terbebas dari penyakit karena rutin mengikuti kegiatan imunisasi.